

Soal Anggaran IKN Ditinjau Ulang, Jokowi: Itu Urusan Pemerintah

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 08/02/2025



ORINEWS.id – Presiden Indonesia ke-7 [Joko Widodo](#) atau [Jokowi](#) merespon dengan santai ketika ditanya soal anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu yang ditinjau ulang oleh pemerintah.

Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

Menanggapi hal itu, Jokowi hanya mengatakan agar hal tersebut ditanyakan langsung ke pemerintah saja, bukan ke dirinya.

Karena menurutnya ia tak berwenang menerima informasi secara langsung perkembangan IKN.

“Tanyakan ke pemerintah. Itu kan urusan pemerintah. Enggak ada hubungannya. Laporan progres ya ke Presiden,” tutur Jokowi

dikutip dari Tribunnews, Sabtu (8/2/2025).

Jokowi mengaku selama ini ia tak begitu mengikuti langsung perkembangan IKN.

Dan jika berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, ia hanya menanyakan masalah pribadi.

“Ya kadang-kadang mengabarkan aja bukan urusan pekerjaan. Sehat, Pak Bas. Keluarga gimana,” ungkapnya.

Seperti dilansir dari Kompas TV Sabtu (8/2/2025) IKN kembali menjadi perbincangan publik usai pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang berujar anggaran diblokir sehingga proyek di IKN tak bisa dijalankan.

Namun belakangan ia meralat perkataannya.

Ia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dampak dari efisiensi anggaran pihaknya harus mengajukan kembali perencanaan ke DPR RI untuk disetujui.

“Sebetulnya bukan di-lock. Beberapa kali Bapak Presiden ([Prabowo](#)) mengatakan bahwa kita wajib efisien. Mengurangi kebocoran sana-sini. Salah satu cara Pak Presiden kepada menteri-menterinya bahwa ini adalah salah satu cara untuk efisiensi,” ungkapnya.

Dody mengatakan anggaran belum bisa dijalankan karena masih dalam proses persetujuan.

Anggaran yang dimaksud mencakup semua proyek, tak hanya yang berkaitan dengan IKN.

“Saya nggak tahu kalau IKN. Saya terefisiensi. Nggak cuma IKN semua kena,” jelasnya.

Disisi lain Prabowo sebenarnya sudah menyiapkan dan sebesar Rp 48 Triliun untuk IKN.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

Republik Indonesia (RI), Hasan Nasbi.

Hasan menegaskan, Presiden tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Yang jelas komitmen dari bapak Presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan.”

“Bahwa selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan, kalau tidak salah Rp 48 T komitmen selama 5 tahun ke depan,” kata Hasan.

Penegasan ini disampaikan untuk membantah kabar pemangkasan anggaran IKN.[]